Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.1, Mei 2025, pp. 201 - 219
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

ANALISIS SIA PERSEDIAAN PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BPKA DIY TAHUN 2023

Firmanda Azhar Nugraha[1], Agung Slamet Prasetyo[2]
[1]STIE Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, e-mail: nandaazhar@gmail.com
[2]STIE Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, e-mail: agungsp@stieww.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 21 March 2025
Received in revised form 11 April 2025
Accepted 11 April 2025
Available online 31 May 2025

ABSTRACT

Indonesia's financial reforms, starting in 2003, introduced accrual-based Government Accounting Standards (PP No. 71/2010) for transparent and efficient financial management. The Provincial Government of Yogyakarta (DIY) is required to produce accurate financial reports, including inventory management under PSAP No. 05. BPKA DIY plays a key role but faces challenges due to discrepancies between financial and inventory systems. This study examines the importance of an integrated inventory accounting system in improving the quality of financial reporting at BPKA DIY, offering recommendations to enhance efficiency and transparency.
Keywords: AIS, Inventory, Financial Statements, Local Government, Government Accounting Standards.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi keuangan sejak 2003 dengan menerbitkan undang-undang yang mendasari pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, salah satunya melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Pemerintah Daerah DIY, sebagai entitas pelaporan, wajib menyusun laporan keuangan yang akurat, termasuk dalam pengelolaan persediaan yang diatur dalam PSAP Nomor 05. BPKA DIY sebagai entitas akuntansi berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan, namun terdapat perbedaan regulasi antara sistem informasi keuangan dan persediaan yang mempengaruhi pengkodean dan pengklasifikasian akun persediaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya sistem informasi akuntansi persediaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di BPKA DIY dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem yang lebih efektif dan efisien guna mendukung akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2003, Indonesia memulai reformasi keuangan negara melalui penerbitan tiga Undang-Undang penting yang mengatur secara komprehensif mengenai keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga peraturan ini menjadi dasar untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Received March 21, 2025; Revised April 11, 2025; Accepted April 11, 2025

Seiring berjalannya waktu, terjadi perkembangan lebih lanjut dalam pengaturan akuntansi pemerintah, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Hal ini mengharuskan seluruh entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, termasuk entitas pelaporan seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu entitas pelaporan yang terdiri dari 30 entitas akuntansi dan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencerminkan sejauh mana akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah DIY telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali, mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik.

Dalam konteks akuntansi, pengelolaan persediaan merupakan salah satu hal yang penting untuk diatur dalam laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, persediaan harus diakui, dicatat, disajikan, dan diungkapkan dengan baik dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar yang berlaku. Pengelolaan persediaan yang baik dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, terutama dalam aspek akurasi pencatatan dan ketepatan pengungkapannya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) merupakan salah satu entitas akuntansi di Pemerintah Daerah DIY yang berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk laporan mengenai persediaan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peranan vital dalam pengelolaan persediaan, karena sistem ini dapat memastikan pencatatan dan pengungkapan persediaan yang akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan antara sistem informasi keuangan dan sistem informasi persediaan yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pengkodean dan klasifikasi akun persediaan. Hal ini memerlukan adanya penyempurnaan dalam sistem informasi akuntansi untuk mengatasi perbedaan dan memastikan pengelolaan persediaan yang efisien dan akuntabel.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu merupakan referensi yang penting dalam memberikan dasar teori serta pandangan terhadap topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, sejumlah studi yang relevan diulas untuk mengetahui perkembangan penerapan sistem informasi akuntansi persediaan. Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Elli Agustiningsih, Risya Juliana Eka Putri, Euis Hernawati/2021	Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai di Dinas Pendidikan Kota Bandung	Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dapat menyimpan data dengan baik dan menghasilkan laporan yang diperlukan. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah petugas dalam mengelola persediaan barang.
2.	Angelina Deborah Umboh, Jantje J. Tinangon /2021	Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 pada Dinas Kesehatan Kota Manado	Penerapan PSAP No. 5 di Dinas Kesehatan Kota Manado telah dilakukan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengungkapan dan pengelolaan persediaan.
3.	Juzinar Suhimarita, Didi Sudianto /2019	Aplikasi Akuntansi Persediaan Obat pada Klinik Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung	Aplikasi akuntansi persediaan obat memberikan solusi yang efektif untuk pengelolaan data, sehingga mempermudah proses administrasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Klinik Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung.
4.	Ahmad Irfansyah/2022	Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan (ASAP) Terhadap EFEKTIVITAS Pelaporan Persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Aplikasi ASAP telah menunjukkan efektivitas dalam pelaporan keuangan, dengan kemampuan menghasilkan laporan yang terperinci dan memudahkan proses stock opname. Namun, terdapat kendala signifikan dalam penginputan data, di mana sering terjadi kesalahan input akibat menu yang tidak sesuai. Selain itu, masalah selisih pencatatan persediaan bulanan juga diidentifikasi, yang disebabkan oleh data

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

No.	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			yang tidak selalu mencakup persediaan yang sudah diterima tetapi belum tercatat. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi, disarankan adanya perbaikan pada menu, kemudahan akses, dan tampilan aplikasi. Dengan demikian, meskipun aplikasi ini efektif dalam pelaporan, perbaikan diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penginputan data.

Sumber : data diolah (2025)

2.2. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan proses pengelolaan transaksi dan kejadian keuangan publik, yang mencakup identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, penyajian laporan, dan penginterpretasian hasilnya untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan pemerintah mencakup informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas yang digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Akuntansi pemerintah berbeda dengan akuntansi sektor komersial dalam beberapa hal, antara lain dalam tujuan dan pengguna laporan. Akuntansi pemerintah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada publik dan pemangku kepentingan guna memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif, sementara akuntansi komersial fokus pada pengambilan keputusan bisnis dan penyediaan informasi bagi investor dan manajemen. Selain itu, akuntansi pemerintah menggunakan basis akrual dan kas, sedangkan sektor komersial secara konsisten menggunakan basis akrual untuk semua transaksi.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang disertai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Implementasi PSAP (IPSAP), dan Buletin Teknis SAP. SAP ini mencakup prinsip-prinsip dan kebijakan yang digunakan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Proses penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah dilakukan dengan konsolidasi laporan keuangan unit kerja yang berfungsi sebagai kantor pusat dan cabang, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pengelolaan persediaan pada sektor pemerintah juga memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sektor komersial. Dalam akuntansi pemerintah, persediaan mencakup barang yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang yang dijual atau diserahkan untuk pelayanan publik. Berbeda dengan sektor komersial, persediaan pada pemerintah tidak dibedakan antara barang yang digunakan untuk operasional dan yang dijual, karena keduanya dicatat dalam satu akun persediaan. Pengelolaan persediaan pemerintah mencakup serangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, pengamanan, penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan persediaan. Dasar hukum yang mengatur pengelolaan persediaan di sektor pemerintah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05, serta peraturan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya.

2.3. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data guna menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan Keputusan (Romney & Steinbart, 2016). SIA terdiri dari berbagai komponen penting, seperti pengguna, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta kontrol internal dan keamanan. Sistem ini dirancang untuk mendukung kegiatan bisnis dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. SIA juga dapat dipahami sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang disusun secara terkoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Perusahaan (Mulyadi, 2018).

Salah satu komponen yang sangat penting dalam SIA adalah sistem teknik dokumentasi. Sistem Teknik Dokumentasi berfungsi untuk memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan diproses dapat dilacak dan diverifikasi (Romney & Steinbart, 2016). Dokumentasi ini mencakup catatan transaksi, prosedur operasional, dan laporan keuangan. Dengan dokumentasi yang baik, organisasi dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini penting untuk melacak aliran data dalam sistem dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari SIA dapat dipertanggungjawabkan.

Komponen lainnya yang mendukung kelancaran operasional SIA adalah penggunaan database relasional. Database relasional memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur, di mana data disimpan dalam bentuk

tabel yang saling terhubung satu sama lain, memudahkan pengambilan dan pengolahan informasi. Penggunaan database relasional sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pencarian data dan mengurangi redundansi informasi. Beberapa manfaat dari database relasional, sebagaimana dijelaskan oleh Romney dan Steinbart (2018), termasuk integrasi data yang memungkinkan penggabungan file master menjadi satu kumpulan data yang dapat diakses oleh berbagai program, serta data sharing yang mempermudah distribusi data. Selain itu, penggunaan database ini juga meningkatkan fleksibilitas pelaporan, meminimalkan duplikasi data, dan memberikan manajemen data yang lebih terpusat.

Secara keseluruhan, Sistem Informasi Akuntansi memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, yang sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam suatu organisasi. Dengan adanya dokumentasi yang baik, penggunaan database relasional yang efisien, serta alat grafis seperti DFD, SIA dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan informasi keuangan organisasi.

2.4. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah

2.4.1. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem informasi akuntansi keuangan, yang digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan SIPD ini diatur oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan peralihan pada Permendagri tersebut, dinyatakan bahwa semua sistem informasi pembangunan daerah dan sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik harus diintegrasikan dengan SIPD.

SIPD terdiri dari beberapa modul yang mendukung berbagai tahapan dalam proses pengelolaan keuangan daerah, antara lain modul perencanaan, modul penatausahaan, dan modul akuntansi dan pelaporan. Pada modul perencanaan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, seperti penyusunan standar harga, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta kegiatan perencanaan lainnya. Sementara itu, pada modul penatausahaan, tahapan yang dilakukan mencakup penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu, modul penatausahaan memungkinkan pengunduhan output berupa Buku Kas Umum (BKU), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan, dan register SP2D.

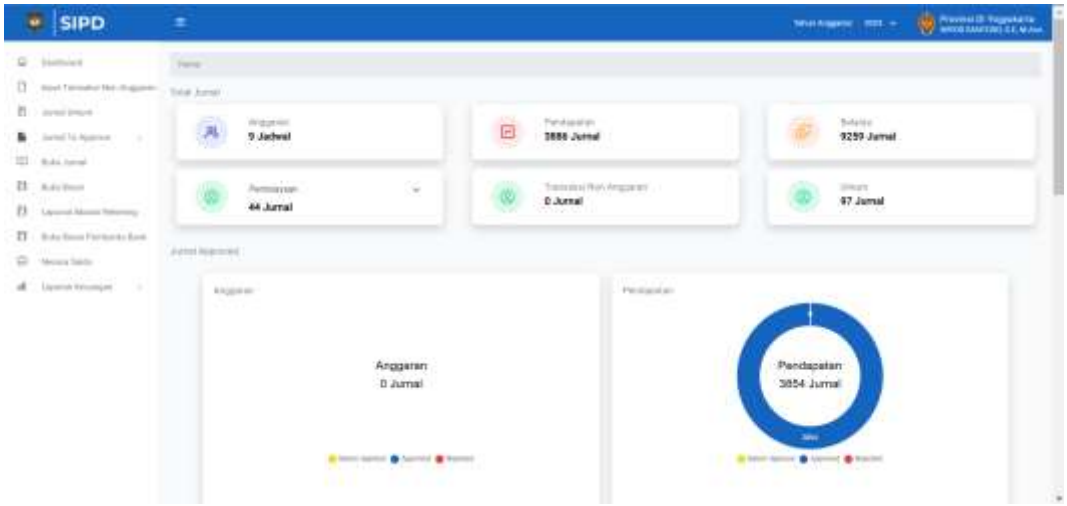
Modul akuntansi dan pelaporan berfungsi untuk mendukung proses pembuatan jurnal dan laporan keuangan, dengan penyesuaian pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah DIY dan kebijakan akuntansi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2021. Modul ini sudah terintegrasi dengan modul penatausahaan, sehingga setiap transaksi belanja yang tercatat dalam modul penatausahaan akan otomatis tercatat sebagai transaksi perolehan barang/jasa pada modul akuntansi dan pelaporan. Namun, transaksi terkait beban persediaan dan beban penyusutan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem SIPD. Untuk memastikan akurasi informasi, petugas akuntansi harus mengonfirmasi nilai pengeluaran barang persediaan dan nilai penyusutan yang tercatat dalam sistem informasi barang milik daerah.

Sebagai bagian dari SIPD, modul penatausahaan dan modul akuntansi dan pelaporan memiliki tampilan dashboard yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dan melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan. Pada gambar berikut ini dapat dilihat tampilan dashboard pada kedua modul tersebut.



Gambar 1. Tampilan Dashboard SIPD Modul Penatausahaan
Sumber : *https://peta.sipd.kemendagri.go.id/siap*

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789



Gambar 2. Tampilan Dashboard SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan
Sumber : *https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap*

Dengan menggunakan SIPD, Pemerintah Daerah DIY dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, mengurangi kesalahan input data, dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan transaksi keuangan. Integrasi antar modul memudahkan pemantauan dan pengelolaan data keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam hal integrasi transaksi beban persediaan dan penyusutan.

2.4.2. Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggunakan dua sistem informasi dalam mengelola akuntansi dan persediaan barang milik daerah. Sistem pertama adalah SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan, yang digunakan untuk akuntansi persediaan, sementara sistem kedua adalah Sistem Informasi Manajemen Persediaan (SIM Persediaan), aplikasi yang dirancang khusus oleh Pemerintah Daerah DIY untuk mengelola persediaan. Penggunaan dua sistem terpisah ini disebabkan karena SIPD belum menyediakan modul khusus untuk pengelolaan persediaan barang milik daerah.

Pengelolaan persediaan barang milik daerah memerlukan sistem terpisah karena persediaan merupakan bagian dari barang milik daerah yang diatur dalam peraturan yang khusus. Aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam peraturan tersebut, terdapat pedoman teknis yang lebih lanjut yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan ini, Pemerintah Daerah DIY menetapkan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang relevan, antara lain Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 56 Tahun 2020. Pada tahun 2021, Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.

Demi memenuhi ketentuan dalam Permendagri tersebut, Pemerintah Daerah DIY mengembangkan dua aplikasi, yaitu SIM Persediaan dan SIM Aset, untuk mengelola barang milik daerah. SIM Persediaan berfokus pada pengelolaan barang persediaan, sementara SIM Aset mengelola aset tetap dan aset lainnya. Kedua aplikasi ini dilengkapi dengan proses bisnis dan kodefikasi akun yang mengikuti peraturan pengelolaan barang milik daerah yang terbaru. Proses bisnis dalam kedua aplikasi ini mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2018, serta kodefikasi barang pada aplikasi ini merujuk pada Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2020.

Aplikasi SIM Aset berfokus pada penatausahaan aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY, seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya seperti buku perpustakaan dan hewan ternak. Aset lainnya mencakup aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset yang berada dalam kondisi rusak berat. Menu-menu yang tersedia di aplikasi SIM Aset mencakup transaksi perolehan aset, transaksi mutasi aset, transaksi reklasifikasi aset, transaksi penghapusan aset, penyusutan aset, dan laporan atau reporting.

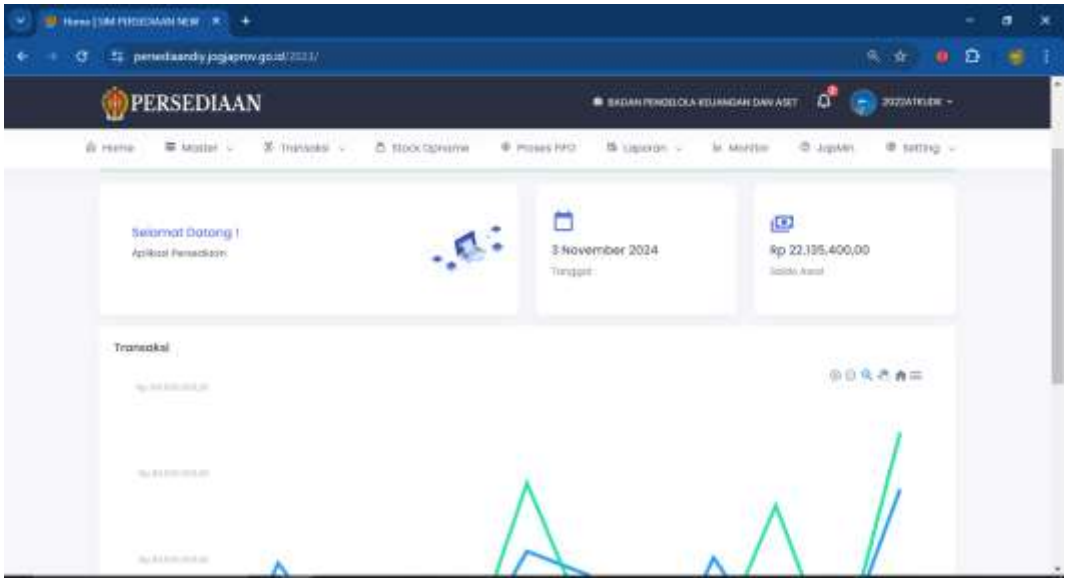
Sementara itu, SIM Persediaan mengelola barang persediaan dengan menu-menu yang mencakup saldo awal, transaksi penerimaan barang persediaan, transaksi pengeluaran barang persediaan, transaksi mutasi barang

persediaan, reklasifikasi persediaan rusak atau usang, penghapusan barang persediaan, dan laporan atau reporting. Kedua aplikasi ini terintegrasi untuk memastikan pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tampilan SIM Aset dan SIM Persediaan adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Tampilan Dashboard Aplikasi SIM Aset
Sumber : *https://asetdiy.jogjaprov.go.id*



Gambar 4. Tampilan Dashboard Aplikasi SIM Persediaan
Sumber : *https://persediaandiy.jogjaprov.go.id*

Melalui penggunaan aplikasi SIM Persediaan dan SIM Aset, Pemerintah Daerah DIY dapat melakukan pengelolaan barang milik daerah secara lebih efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memudahkan dalam pelaporan dan pengawasan barang milik daerah, baik yang berupa persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY), yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Lokasi penelitian dipilih karena peran penting BPKA DIY dalam pengelolaan persediaan dan implementasi sistem informasi akuntansi persediaan yang dapat menjadi model bagi SKPD lainnya.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama:

a. Sistem Informasi Akuntansi Persediaan, yang mencakup proses pencatatan, pembukuan, dan pelaporan persediaan melalui sistem elektronik.
b. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan serta Beban Persediaan pada Laporan Keuangan BPKA DIY Tahun 2023, yang mencakup ketepatan penyajian dan pengungkapan informasi terkait di laporan keuangan.

Data dikumpulkan menggunakan dua instrumen utama:

a. Wawancara, yang dilakukan dengan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan persediaan dan akuntansi.
b. Dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data dari laporan keuangan dan dokumen terkait lainnya.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara, dan data sekunder dari dokumen yang relevan. Sampel penelitian terdiri dari beberapa pegawai dan pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan persediaan dan akuntansi di BPKA DIY, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Persediaan pada BPKA DIY

Pada penelitian ini, diterangkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) menggunakan dua sistem informasi utama dalam pengelolaan persediaan, yaitu SIM Persediaan dan SIPD. SIM Persediaan digunakan untuk mengelola data terkait persediaan dan barang milik daerah, sementara SIPD digunakan untuk pencatatan akuntansi dan laporan keuangan.

SIM Persediaan mengelola berbagai transaksi persediaan, mulai dari penerimaan, pengeluaran, mutasi, hingga reklasifikasi persediaan menjadi barang rusak atau usang. Aplikasi ini dirancang dengan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, yang mengatur tatacara pembukuan dan pelaporan barang milik daerah. Dalam aspek akuntansi, BPKA DIY menggunakan SIPD untuk mencatat penerimaan dan pembebanan persediaan, serta melakukan koreksi ekuitas terkait mutasi antar unit SKPD.

a. Sistem Teknik Dokumentasi Persediaan

Sistem teknik dokumentasi dalam SIM Persediaan di BPKA DIY sangat terstruktur. Beberapa aspek utama dari dokumentasi ini adalah:

1) Kodefikasi Unit Kerja: Setiap unit kerja dalam BPKA DIY memiliki kode unit yang spesifik untuk membedakan dan mengklasifikasikan data persediaan berdasarkan unit kerja yang bertanggung jawab. Kode unit ini membuat laporan persediaan lebih sistematis dan terorganisir per bidang dan unit. Kode unit kerja pada BPKA DIY di aplikasi SIM Persediaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kode dan Nama Unit pada BPKA DIY di Aplikasi SIM Persediaan

Kode Unit	Nama Unit
403.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET (ADMIN)
403.1.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET (SEKRETARIAT)
403.1.1.1	BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN
403.1.1.2	BIDANG ANGGARAN BELANJA
403.1.1.3	BIDANG PENGELOLA KAS DAERAH
403.1.1.4	BIDANG AKUNTANSI
403.1.1.5	BIDANG BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
403.1.1.6	BIDANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
403.1.2	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
403.1.3	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
403.1.4	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
403.1.5	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULON PROGO
403.1.6	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN

Sumber : Aplikasi SIM Persediaan DIY

2) Kodefikasi Barang Persediaan: Pemberian kode unik pada setiap barang persediaan membantu dalam pengelolaan dan pelaporan barang secara efisien. Kodefikasi ini mengacu pada peraturan yang berlaku, dengan adanya perbedaan tingkatan kode antara SIM Persediaan dan SIPD, di mana SIM Persediaan lebih detail hingga pada tingkat spesifikasi barang (NUSP). Misalnya, dalam kategori kertas HVS, terdapat kode untuk berbagai ukuran dan berat kertas.

Tabel 3. Pengkodean Barang Persediaan pada SIM Persediaan dan SIPD

Tingkatan /*Level*	Nama Tingkatan /*Level*	Kode Barang SIM Persediaan	Kode Barang SIPD	Nama Akun
1	Akun	1	1	Aset
2	Kelompok	1.1	1.1	Aset Lancar
3	Jenis	1.1.7	1.1.12	Persediaan
4	Objek	1.1.7.01	1.1.12.01	Barang Pakai Habis
5	Rincian Objek	1.1.7.01.01	1.1.12.01.01	Bahan
6	Sub Rincian Objek	1.1.7.01.01.01	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi
7	Sub-sub Rincian Objek	1.1.7.01.01.01.001	-	Semen

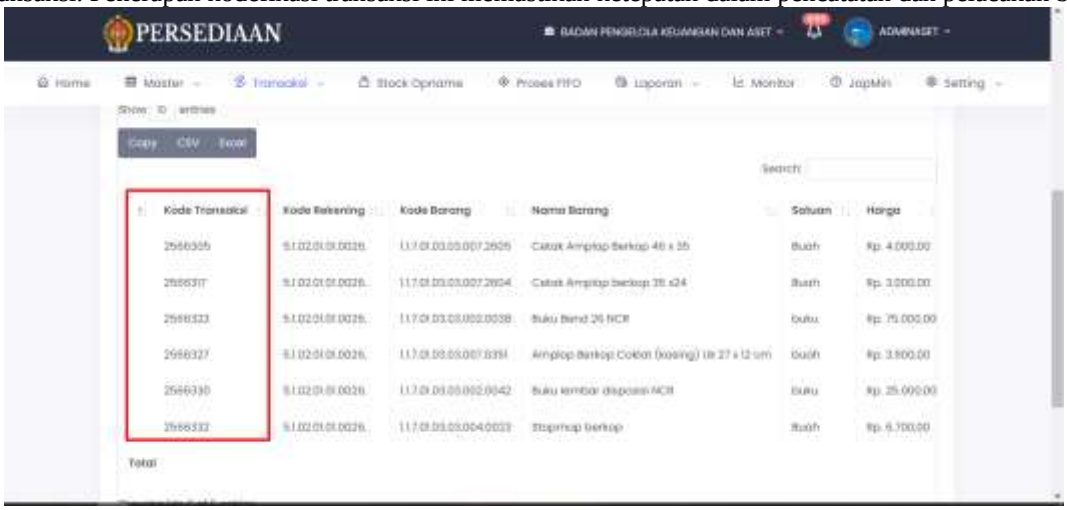
Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Tabel 4. Tabel Pengkodean Barang dan Nomor Urut Spesifikasi Barang Persediaan

Kode Barang	NUSP	Nama Barang
...	...	...
1.1.7.01.03.	-	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
1.1.7.01.03.02	-	Kertas dan Cover
1.1.7.01.03.02.001	-	Kertas HVS
1.1.7.01.03.02.001	0001	Kertas HVS 60 gsm Folio (500 lb)
1.1.7.01.03.02.001	0002	Kertas HVS 60 gsm Kwarto (500 lb)
1.1.7.01.03.02.001	0003	Kertas HVS 60 gsm Double Folio (500 lb)
Dst.	Dst.	Dst.

Sumber : Aplikasi SIM Persediaan DIY

3) Kodefikasi Transaksi: Setiap transaksi terkait persediaan dicatat dengan kode unik yang mencakup informasi lengkap tentang jenis transaksi, tanggal, nomor dokumen, jumlah barang, harga satuan, dan total nilai transaksi. Penerapan kodefikasi transaksi ini memastikan ketepatan dalam pencatatan dan pelacakan barang.

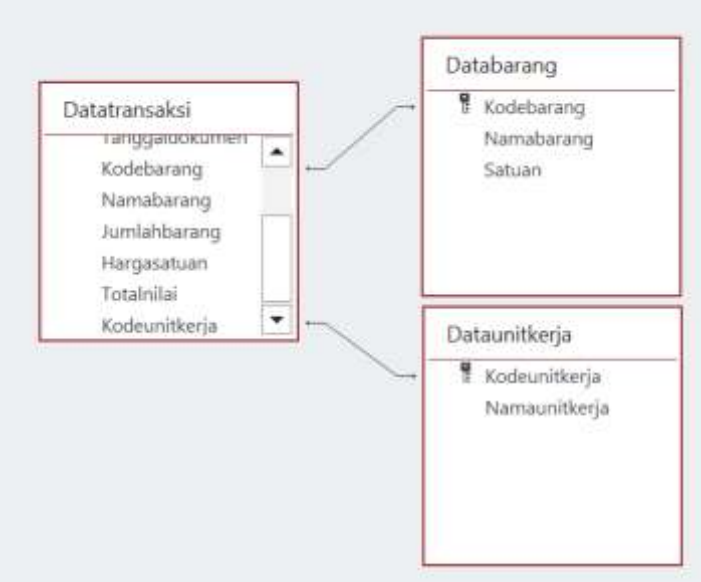


Gambar 5. Kode Transaksi pada SIM Persediaan
Sumber : Aplikasi SIM Persediaan DIY

b. Database Relasional Persediaan

Database relasional yang diterapkan pada SIM Persediaan membantu mengintegrasikan berbagai informasi terkait persediaan, seperti data penerimaan barang, pengeluaran barang, mutasi, serta persediaan rusak berat atau usang. Tiga tabel utama yang digunakan adalah:

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789



Gambar 6. Database Relasional SIM Persediaan

Penjelasan tabel-tabel dalam Database Relasional di atas adalah sebagai berikut :

1) Tabel Datatransaksi: Mencatat seluruh transaksi barang, dengan kolom seperti nomor transaksi, tanggal transaksi, nomor dokumen, dan total nilai transaksi.
2) Tabel Databarang: Berfungsi sebagai master barang dengan informasi terkait kode barang dan satuan pengukuran.
3) Tabel Dataunitkerja: Menyimpan informasi tentang unit kerja yang terlibat dalam transaksi.

Relasi antar tabel diatur menggunakan *primary key* dan *foreign key*, yang memastikan konsistensi data dan mengurangi redundansi. Desain ini meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data persediaan.

c. Data Flow Diagram Pengelolaan Persediaan

Penerapan Data Flow Diagram (DFD) di SIM Persediaan memberikan gambaran yang jelas mengenai alur data dalam sistem pengelolaan persediaan. DFD Level 0 menunjukkan bahwa SIM Persediaan menerima data dari berbagai entitas eksternal, seperti bendahara, pengurus barang, dan pelaksana kegiatan pemerintahan. Data yang diterima ini diproses untuk menghasilkan laporan terkait persediaan, penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan barang.



Gambar 7. DFD SIM Persediaan

Laporan yang dihasilkan digunakan oleh berbagai pihak seperti Kepala OPD untuk pengambilan keputusan, petugas akuntansi untuk memastikan keakuratan laporan keuangan, serta auditor untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan.

4.2 Proses Penyajian Nilai Persediaan dan Beban Persediaan di Laporan Keuangan BPKA DIY berdasarkan Data Sistem Informasi Akuntansi Persediaan

a. Penyajian Saldo Awal Persediaan

Saldo Awal Persediaan pada SIM Persediaan pada 1 Januari 2023 diambil dari data migrasi saldo akhir tahun 2022. Data ini mencakup semua barang persediaan yang tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY serta Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) se-DIY, dengan total nilai sebesar Rp2.864.751.715,40. Rincian saldo awal persediaan BPKA DIY pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Saldo awal Persediaan BPKA DIY 1 Januari 2023 versi Aplikasi SIM Persediaan

Kode Barang (s.d. Sub RO)	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Nilai (Rp)
1.1.7	PERSEDIAAN	2.632.368,00	2.864.751.715,40
1.1.7.01	BARANG PAKAI HABIS	2.632.368,00	2.864.751.715,40
1.1.7.01.01	BAHAN	1.066,00	81.910.000,00
1.1.7.01.01.04	Bahan Bakar dan Pelumas	1.066,00	81.910.000,00
1.1.7.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	2.631.292,00	2.782.531.715,40
1.1.7.01.03.01	Alat Tulis Kantor	1.602.823,00	1.069.259.213,71
1.1.7.01.03.02	Kertas dan Cover	96.948,00	215.258.640,00
1.1.7.01.03.03	Bahan Cetak	922.703,00	428.466.390,00
1.1.7.01.03.04	Benda Pos	770,00	7.700.000,00
1.1.7.01.03.06	Bahan Komputer	3.323,00	839.726.635,00
1.1.7.01.03.07	Perabot Kantor	1.217,00	34.707.996,69
1.1.7.01.03.08	Alat Listrik	2.239,00	134.389.160,00
1.1.7.01.03.09	Perlengkapan Dinas	19,00	855.000,00
1.1.7.01.03.12	Suvenir/Cendera mata	16,00	2.625.600,00
1.1.7.01.03.13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.234,00	49.543.080,00
1.1.7.01.07	NATURA DAN PAKAN	10,00	310.000,00
1.1.7.01.07.01	Natura	10,00	310.000,00

Sumber : Aplikasi SIM Persediaan DIY

Saldo Awal Persediaan pada SIPD mengacu pada laporan neraca yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saldo pada SIPD juga menunjukkan nilai total yang sama dengan saldo pada SIM Persediaan, yaitu Rp2.864.751.715,40. Perbedaan penyajian antara SIM Persediaan dan SIPD terjadi dalam hal kode barang yang digunakan, yang memerlukan rekonsiliasi dan mapping kode antara keduanya, sesuai dengan regulasi yang berlaku (Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 dan Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2020).

Tabel 6. Saldo awal Persediaan BPKA DIY 1 Januari 2023 versi Aplikasi SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan

Kode Akun	Uraian Akun	Jumlah Nilai (Rp)
1.1.12	PERSEDIAAN	2.864.751.715,40
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	81.910.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.069.259.213,71
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	215.258.640,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	428.466.390,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	7.700.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	839.726.635,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	34.707.996,69
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	134.389.160,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	855.000,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera mata	2.625.600,00

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Kode Akun	Uraian Akun	Jumlah Nilai (Rp)
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.543.080,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	310.000,00

Sumber : Laporan Neraca aplikasi SIPD tertanggal 1 Januari 2023

b. Proses Penerimaan Persediaan

Penerimaan persediaan yang tercatat dalam SIM Persediaan dilakukan pada tiga kondisi utama: pengadaan barang, hibah, dan temuan pemeriksa barang dari tahun anggaran sebelumnya. Setiap penerimaan barang harus dicatat dengan detail seperti nomor berita acara penerimaan, tanggal, nama supplier, faktur, sumber dana, dan kode rekening belanja persediaan. Dalam SIPD, proses penerimaan persediaan berawal dari belanja persediaan yang tercatat dalam aplikasi SIPD Modul Penatausahaan dan diselesaikan dengan Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Setelah itu, dari SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Aklap) melakukan *approve* jurnal penerimaan dengan contoh jurnal sebagai berikut :


Metode Aset

Jurnal SKPD

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 2.078.500	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		Rp 2.078.500

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Rp 2.078.500	
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp 2.078.500

Gambar 8. Jurnal Pembelian Persediaan yang Diapprove oleh Petugas Akuntansi

Sumber : Aplikasi SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan

Proses penerimaan yang tercatat dalam SIM Persediaan menggunakan sistem transaksi yang memungkinkan pengurus barang untuk memilih barang yang diterima, menginput jumlah barang dan harga satuan sesuai dengan nota pembelian, serta memastikan total nilai transaksi sesuai dengan nilai belanja persediaan. Setelah penerimaan barang selesai, pengurus barang melakukan verifikasi dan memastikan kesesuaian antara data transaksi dan fisik barang yang diterima. Data penerimaan persediaan selama Tahun 2023 yang tercatat pada SIM Persediaan dan nantinya akan direkonsiliasi adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Data Penerimaan Persediaan BPKA DIY selama Tahun 2023

Kode	Rincian Barang	Jumlah Barang	Nilai
1.1.7.01.01.02.	BAHAN KIMIA	380,00	5.596.380,00
1.1.7.01.01.04.	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	115.969.449,00	677.189.010,00
1.1.7.01.01.09.	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	117,00	40.556.300,00
1.1.7.01.01.12.	BAHAN LAINNYA	33,00	893.800,00
1.1.7.01.02.01.	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	506,00	169.802.892,00
1.1.7.01.02.02.	SUKU CADANG ALAT BESAR	4,00	987.900,00
1.1.7.01.02.08.	SUKU CADANG ALAT BENGKEL	3,00	2.997.000,00
1.1.7.01.03.01.	ALAT TULIS KANTOR	31.403,00	282.130.818,00
1.1.7.01.03.02.	KERTAS DAN COVER	12.454,00	212.255.413,78
1.1.7.01.03.03.	BAHAN CETAK	4.700.472,00	1.713.731.284,00
1.1.7.01.03.04.	BENDA POS	2.479,00	27.490.000,00
1.1.7.01.03.06.	BAHAN KOMPUTER	4.760,00	1.086.363.057,22
1.1.7.01.03.07.	PERABOT KANTOR	3.997,00	113.991.136,00
1.1.7.01.03.08.	ALAT LISTRIK	2.613,00	147.592.902,00

Kode	Rincian Barang	Jumlah Barang	Nilai
1.1.7.01.03.09.	PERLENGKAPAN DINAS	518,00	77.394.970,00
1.1.7.01.03.13.	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	820,00	26.094.808,00
1.1.7.01.07.01.	NATURA	1.162,00	25.244.800,00
1.1.7.01.07.02.	PAKAN	24,00	614.400,00
Total		120.731.194,00	4.610.926.871,00

Sumber : Aplikasi SIM Persediaan DIY

c. Rekonsiliasi Penerimaan Persediaan

Rekonsiliasi data penerimaan antara SIM Persediaan dan SIPD dilakukan untuk memastikan bahwa data penerimaan yang diinput oleh pengurus barang pada SIM Persediaan sesuai dengan catatan akuntansi persediaan di SIPD. Rekonsiliasi ini melibatkan pencocokan kode persediaan pada SIM Persediaan dan SIPD, yang seringkali memiliki perbedaan dalam struktur pengkodean dan klasifikasi barang. Oleh karena itu, diperlukan proses mapping kode untuk mencocokkan antara belanja persediaan dan kode barang yang relevan. Hasil rekonsiliasi ini ditindaklanjuti dengan jurnal reklasifikasi yang dilakukan oleh petugas akuntansi.

Sebagai contoh, pembelian stopmap yang awalnya tercatat sebagai belanja kertas dan cover dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus direklasifikasi ke dalam klasifikasi alat tulis kantor sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi data yang akurat antara SIM Persediaan dan SIPD dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam melakukan rekonsiliasi, perlu dilakukan *mapping* antara kode rekening belanja dengan kode barang. *Mapping*-nya adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Mapping Kode Persediaan

Kode Belanja	Nama Belanja	Kode Persediaan	Sub RO Persediaan
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.7.01.01.01	Bahan Bangunan dan Konstruksi
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.1.7.01.01.02	Bahan Kimia
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.1.7.01.01.04	Bahan Bakar dan Pelumas
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.1.7.01.01.05	Bahan Baku
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	1.1.7.01.01.07	Barang dalam Proses
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.1.7.01.01.08	Bahan/Bibit Tanaman
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.1.7.01.01.09	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.1.7.01.01.10	Isi Tabung Gas
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.1.7.01.01.11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.1.7.01.01.12	Bahan Lainnya
dst.	dst.	dst.	dst.

Sumber : Permendagri 108 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Setelah dibandingkan antara belanja barang persediaan di SIPD penatausahaan dan inputan di aplikasi persediaan, diperoleh hasil rekonsiliasi sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Belanja Persediaan dengan Transaksi Penerimaan Persediaan di SIM Persediaan

Row Labels	Sum of Nilai LRA sebelum Koreksi	Entri	Selisih
1.1.7.01.01.02 Bahan Kimia	5.873.580,00	5.596.380,00	- 277.200,00
1.1.7.01.01.04 Bahan Bakar dan Pelumas	670.791.510,00	677.189.010,00	6.397.500,00
1.1.7.01.01.09 Isi Tabung Pemadam Kebakaran	40.556.300,00	40.556.300,00	-
1.1.7.01.01.12 Bahan Lainnya	4.962.800,00	893.800,00	- 4.069.000,00
1.1.7.01.02.01 Suku Cadang Alat Angkutan	166.771.992,00	169.802.892,00	3.030.900,00
1.1.7.01.02.02 Suku Cadang Alat Besar		987.900,00	987.900,00
1.1.7.01.02.08 Suku Cadang Alat Bengkel		2.997.000,00	2.997.000,00
1.1.7.01.03.01 Alat Tulis Kantor	222.707.038,00	282.130.818,00	59.423.780,00
1.1.7.01.03.02 Kertas dan Cover	698.655.285,00	212.255.413,78	- 486.399.871,22
1.1.7.01.03.03 Bahan Cetak	1.771.306.234,00	1.713.731.284,00	- 57.574.950,00
1.1.7.01.03.04 Benda Pos	27.490.000,00	27.490.000,00	-
1.1.7.01.03.06 Bahan Komputer	598.209.692,00	1.086.363.057,22	488.153.365,22
1.1.7.01.03.07 Perabot Kantor	114.582.336,00	113.991.136,00	- 591.200,00
1.1.7.01.03.08 Alat Listrik	147.592.902,00	147.592.902,00	-
1.1.7.01.03.09 Perlengkapan Dinas	77.394.970,00	77.394.970,00	-
1.1.7.01.03.13 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.172.482,00	26.094.808,00	11.922.326,00
1.1.7.01.07.01 Natura	34.305.800,00	25.244.800,00	- 9.061.000,00
1.1.7.01.07.02 Pakan	614.400,00	614.400,00	-
Grand Total	4.595.987.321,00	4.610.926.871,00	14.939.550,00

Sumber : Notula Rekonsiliasi Persediaan BPKA DIY Tahun 2023

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Setelah itu, pengurus barang persediaan dan petugas akuntansi menelusuri penyebab selisih pada Grand Total dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Rekonsiliasi Persediaan BPKA DIY Tahun 2023

Row Labels	Selisih	Selisih 2		
1.1.7.01.01.02 Bahan Kimia	- 277.200,00	- 277.200,00		
1.1.7.01.01.04 Bahan Bakar dan Pelumas	6.397.500,00	510.000,00	5.887.500,00	Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan genset
1.1.7.01.01.09 Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-		
1.1.7.01.01.12 Bahan Lainnya	- 4.069.000,00	- 4.069.000,00		
1.1.7.01.02.01 Suku Cadang Alat Angkutan	3.030.900,00	- 510.000,00	3.540.900,00	Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan genset
1.1.7.01.02.02 Suku Cadang Alat Besar	987.900,00	-	987.900,00	Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan genset
1.1.7.01.02.08 Suku Cadang Alat Bengkel	2.997.000,00	-	2.997.000,00	Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan genset
1.1.7.01.03.01 Alat Tulis Kantor	59.423.780,00	59.423.780,00		
1.1.7.01.03.02 Kertas dan Cover	- 486.399.871,22	- 486.399.871,22		
1.1.7.01.03.03 Bahan Cetak	- 57.574.950,00	- 57.574.950,00		
1.1.7.01.03.04 Benda Pos	-	-		
1.1.7.01.03.06 Bahan Komputer	488.153.365,22	486.627.115,22	1.526.250,00	Reklasifikasi dari belanja modal peralatan komputer
1.1.7.01.03.07 Perabot Kantor	- 591.200,00	- 591.200,00		
1.1.7.01.03.08 Alat Listrik	-	-		
1.1.7.01.03.09 Perlengkapan Dinas	-	-		
1.1.7.01.03.13 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.922.326,00	11.922.326,00		
1.1.7.01.07.01 Natura	- 9.061.000,00	- 9.061.000,00		
1.1.7.01.07.02 Pakan	-	-		
Grand Total	14.939.550,00	-		

Sumber : Notula Rekonsiliasi Persediaan BPKA DIY Tahun 2023

Dari hasil rekonsiliasi tersebut, petugas akuntansi membuat jurnal reklasifikasi seperti di bawah ini :

Tabel 11. Jurnal Reklasifikasi Persediaan selama Tahun 2023 pada BPKA DIY

Akun	Debit	Kredit
Bahan Bakar dan Pelumas	5.887.500,00	
Suku Cadang Alat Angkutan	3.540.900,00	
Suku Cadang Alat Besar	987.900,00	
Suku Cadang Alat Bengkel	2.997.000,00	
Beban Pemeliharaan Genset		13.413.300,00
Bahan Komputer	1.526.250,00	
Peralatan Komputer		1.526.250,00
Bahan Bakar dan Pelumas	510.000,00	
Alat Tulis Kantor	59.423.780,00	
Bahan Komputer	486.627.115,22	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.922.326,00	
Bahan Kimia		277.200,00
Bahan Lainnya		4.069.000,00
Suku Cadang Alat Angkutan		510.000,00
Kertas dan Cover		486.399.871,22
Bahan Cetak		57.574.950,00
Perabot Kantor		591.200,00
Natura		9.061.000,00

Sumber : Jurnal Umum SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan

d. Pengeluaran Persediaan

Proses pengeluaran persediaan pada SIM Persediaan mencatat penggunaan persediaan untuk kebutuhan operasional internal, bukan untuk penyerahan atau penjualan kepada masyarakat. Proses pengeluaran ini harus dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti Nota Permintaan Barang (NPB), Surat Permintaan Barang (SPB), Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB), dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Setelah kelengkapan dokumen disiapkan, pengurus barang melakukan pemilihan barang yang akan dikeluarkan dari gudang, mencatat jumlah barang, serta memastikan stok barang yang dikeluarkan sesuai dengan data yang tercatat.

Pada SIPD, pengeluaran persediaan dicatat sebagai pembebanan persediaan dalam jurnal pembebanan yang mencatat nilai pengeluaran barang. Pengeluaran persediaan dihitung berdasarkan rumus: Pengeluaran = Saldo Awal + Penerimaan - Saldo Akhir. Jurnal pembebanan persediaan ini mencatat semua transaksi yang terkait dengan penggunaan barang persediaan selama tahun anggaran, yang kemudian dikreditkan pada akun persediaan.

Data pengeluaran persediaan yang dicatat oleh pengurus barang persediaan BPKA DIY dan dicatat sebagai beban persediaan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Data Pengeluaran Persediaan BPKA DIY Tahun 2023 yang Menjadi Beban Persediaan

Persediaan	**Nilai Pengeluaran selama 2023**
Bahan Kimia	5.596.380,00
Bahan Bakar dan Pelumas	595.024.010,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	40.556.300,00
Bahan Lainnya	893.800,00
Suku Cadang Alat Angkutan	169.802.892,00
Suku Cadang Alat Besar	987.900,00
Suku Cadang Alat Bengkel	2.997.000,00
Alat Tulis Kantor	883.101.701,02
Kertas dan Cover	219.957.239,70
Bahan Cetak	1.238.474.408,40
Benda Pos	29.430.000,00
Bahan Komputer	1.020.751.794,35
Perabot Kantor	120.084.139,36
Alat Listrik	166.079.385,00
Perlengkapan Dinas	77.889.970,00
Suvenir/Cenderamata	2.625.600,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38.255.208,00
Natura	25.554.800,00
Pakan	614.400,00

Sumber : Rekap Pengeluaran Persediaan di SIM Persediaan dan Jurnal Umum SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan

e. Mutasi Internal Persediaan

Mutasi internal persediaan di BPKA DIY dilakukan untuk menjaga keseimbangan stok barang antara unit SKPD yang berbeda, seperti antara BPKA dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD). Proses ini menggunakan fitur transaksi mutasi internal di aplikasi SIM Persediaan, yang memungkinkan setiap pergerakan barang antar unit tercatat dengan akurat. Transaksi mutasi internal ini tidak memerlukan pencatatan jurnal di SIPD karena semua transaksi tetap berada dalam satu entitas akuntansi yang sama.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun transaksi mutasi antar unit tidak memerlukan jurnal, pengelolaan barang harus tetap transparan, dengan proses dokumentasi yang lengkap untuk setiap pengiriman dan penerimaan barang antar unit. Hal ini memastikan bahwa distribusi barang dapat dilakukan secara efisien dan tepat waktu, tanpa menimbulkan kekeliruan dalam pengelolaan persediaan.

Data mutasi internal persediaan pada BPKA DIY selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Data Mutasi Internal Persediaan BPKA DIY Tahun 2023

Kode	Rincian Barang	Mutasi Masuk		Mutasi Keluar	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1.1.7.01.03.01.	ALAT TULIS KANTOR	155.000	73.950.000,00	155.000	73.950.000,00

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

1.1.7.01.03.03.	BAHAN CETAK	3.240.400	1.080.546.372,00	3.240.400	1.080.546.372,00
Total		3.395.400	1.154.496.372,00	3.395.400	1.154.496.372,00

Sumber : Rekap Mutasi Internal pada Aplikasi SIM Persediaan

f. Persediaan Rusak Berat

Persediaan yang rusak berat atau usang harus dikeluarkan dari catatan persediaan. Proses penghapusan dilakukan dengan menggunakan transaksi reklasifikasi dalam SIM Persediaan, di mana barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi dikeluarkan dari neraca dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 05. Setelah barang rusak diklasifikasikan sebagai rusak berat/usang, petugas akuntansi mencatat kerugian atas persediaan tersebut dalam jurnal yang relevan.

Berikut adalah jurnal yang dibuat oleh petugas akuntansi berdasarkan data persediaan rusak berat/usang yang disajikan oleh pengurus barang persediaan:

Tabel 14. Jurnal Reklasifikasi Persediaan Rusak Berat/Usang

Akun	Debit	Kredit
Kerugian atas persediaan rusak berat/usang	157.968.000,00	
Alat Tulis Kantor		17.712.000,00
Kertas dan Cover		1.780.500,00
Bahan Cetak		3.758.800,00
Bahan Komputer		131.063.700,00
Alat Listrik		3.653.000,00

Sumber : Transaksi Reklasifikasi Persediaan Rusak Berat/Usang dan Jurnal Umum SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan

g. Saldo Akhir Persediaan Tahun 2023

Saldo akhir persediaan merupakan jumlah persediaan yang masih tersedia dan belum digunakan hingga akhir periode pelaporan, yaitu per 31 Desember 2023. Saldo ini dihitung berdasarkan saldo awal, ditambah penerimaan, dan dikurangi pengeluaran. Untuk memastikan ketepatan nilai persediaan, dilakukan stock opname oleh pengurus barang persediaan guna mencocokkan data dalam sistem dengan kondisi fisik di gudang. Apabila ditemukan perbedaan antara catatan dan fisik, maka dilakukan penyesuaian pada pengeluaran persediaan, dengan tetap mempertahankan kesesuaian penerimaan dengan realisasi anggaran.

Saldo akhir persediaan yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Persediaan menunjukkan kondisi persediaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) per tanggal 29 Desember 2023. Hasil stock opname memastikan bahwa nilai yang dilaporkan sesuai dengan persediaan fisik. Berikut adalah rincian saldo akhir persediaan berdasarkan SIM Persediaan:

Tabel 15. Saldo Akhir Persediaan BPKA DIY per Tanggal 31 Desember 2023 versi Aplikasi SIM Persediaan

Kode Barang (s.d. Sub RO)	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Nilai (Rp)
1.1.7	PERSEDIAAN	2.967.122,00	2.679.033.658,57
1.1.7.01	BARANG PAKAI HABIS	2.967.122,00	2.679.033.658,57
1.1.7.01.01	BAHAN	2.096,00	164.075.000,00
1.1.7.01.01.04	Bahan Bakar dan Pelumas	2.096,00	164.075.000,00
1.1.7.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	2.965.026,00	2.514.958.658,57
1.1.7.01.03.01	Alat Tulis Kantor	341.530,00	450.576.330,69
1.1.7.01.03.02	Kertas dan Cover	96.086,00	205.776.314,08

Kode Barang (s.d. Sub RO)	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Nilai (Rp)
1.1.7.01.03.03	Bahan Cetak	2.519.480,00	899.964.465,60
1.1.7.01.03.04	Benda Pos	576,00	5.760.000,00
1.1.7.01.03.06	Bahan Komputer	2.978,00	774.274.197,87
1.1.7.01.03.07	Perabot Kantor	679,00	28.614.993,33
1.1.7.01.03.08	Alat Listrik	2.799,00	112.249.677,00
1.1.7.01.03.09	Perlengkapan Dinas	8,00	360.000,00
1.1.7.01.03.13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	890,00	37.382.680,00

Sumber : Laporan Saldo Persediaan BPKA DIY 31 Desember 2023 pada SIM Persediaan

Selain dalam SIM Persediaan, saldo akhir persediaan juga tercatat dalam neraca laporan keuangan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD). Nilai ini diperoleh dari hasil stock opname yang telah dilakukan dan mencerminkan kondisi persediaan pada akhir tahun. Berikut adalah rincian saldo akhir persediaan yang disajikan dalam neraca laporan keuangan:

Tabel 16. Saldo Akhir Persediaan BPKA DIY per Tanggal 31 Desember 2023 versi SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan

Kode Akun	Nama Akun	Nilai (Rupiah)
1.1.12	PERSEDIAAN	2.679.033.658,57
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	164.075.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	450.576.330,69
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	205.776.314,08
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	899.964.465,60
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	5.760.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	774.274.197,87
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	28.614.993,33
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	112.249.677,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	360.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.382.680,00

Sumber : Neraca Laporan Keuangan BPKA DIY Posisi Tanggal 31 Desember 2023

8. Laporan Persediaan

Pelaporan persediaan baik pada SIM Persediaan maupun SIPD dilakukan secara rutin dengan mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Laporan tersebut meliputi laporan penerimaan, pengeluaran, dan mutasi persediaan, serta laporan persediaan rusak berat/usang. Setiap laporan disesuaikan dengan format yang diatur dalam regulasi untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di pemerintah daerah.

Pada Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di SIPD, laporan yang berkaitan dengan persediaan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran berkaitan dengan berapa belanja persediaan selama satu tahun anggaran. Laporan Operasional berkaitan dengan berapa nilai beban persediaan selama satu tahun anggaran. Laporan Perubahan Ekuitas berkaitan dengan perubahan nilai persediaan karena adanya penyesuaian nilai di saldo awal atau terdapat perubahan kebijakan pencatatan persediaan. Neraca berkaitan dengan berapa persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan berapa nilai persediaan rusak berat/usang, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, dan penjelasan lainnya Laporan ini juga digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan oleh auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

4.3 Proses Penyajian Nilai Persediaan dan Beban Persediaan di Laporan Keuangan BPKA DIY berdasarkan Data Sistem Informasi Akuntansi Persediaan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara dengan tiga personil yang memiliki peran penting dalam pengelolaan persediaan, khususnya dalam penatausahaan dan pelaporan persediaan di BPKA DIY. Ketiga personil tersebut adalah pengurus barang persediaan, petugas akuntansi, dan sekretaris BPKA DIY selaku pejabat penatausahaan barang pengguna pada BPKA DIY. Hasil wawancara menunjukkan adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penatausahaan dan pelaporan persediaan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kendala dari Sisi Pengurus Barang Persediaan
   Pengurus barang persediaan di BPKA DIY menghadapi kendala utama berupa keterlambatan pengumpulan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja persediaan oleh pelaksana teknis kegiatan. Hal ini menghambat pencatatan penerimaan atau perolehan barang persediaan. Selain itu, sering terjadi pengeluaran atau pengembalian barang ke gudang tanpa pemberitahuan, yang baru terdeteksi saat dilakukan stock opname. Akibatnya, pengurus barang persediaan harus menyesuaikan catatan agar nilai persediaan dalam aplikasi sesuai dengan kondisi fisik di gudang.
b. Kendala dari sisi Petugas Akuntansi
   Petugas akuntansi di BPKA DIY mengalami kesulitan dalam melakukan tracing reklasifikasi dari pengadaan karena beberapa pengadaan barang persediaan tidak menggunakan rekening belanja barang, melainkan rekening belanja modal, jasa, atau pemeliharaan. SIM Persediaan belum dapat mengakomodasi detail pengeluaran dari berbagai jenis belanja tersebut, sehingga pencarian rekening belanja harus dilakukan secara manual, bahkan dengan pengecekan arsip pengadaan yang memakan waktu lama. Selain itu, akses ke aplikasi SIPD tidak selalu tersedia, terutama saat terjadi lonjakan pengguna pada jam kerja, yang mengharuskan petugas menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja, termasuk malam hari atau akhir pekan, sehingga berdampak pada produktivitas dan keseimbangan kerja pegawai.

c. Kendala dari Sisi Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna
   Penganggaran barang persediaan yang telah diatur secara rinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, hal ini juga menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan barang yang sifatnya mendesak atau tidak terduga, karena pengadaan barang di luar rencana memerlukan prosedur revisi anggaran atau persetujuan tambahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Personil pengurus barang persediaan harus merangkap tugas sebagai administrator aplikasi lainnya, seperti SiRUP dan Srikandi, sehingga harus membagi waktu antara berbagai tugas administratif. Di tingkat bidang dan UPTD, kondisi serupa juga terjadi, sehingga diperlukan rekonsiliasi berkala untuk memastikan keakuratan pencatatan persediaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penatausahaan persediaan di pemerintah daerah merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Meskipun terdapat peraturan-peraturan turunan yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan di masing-masing pemerintah daerah, sistem penatausahaan persediaan yang diterapkan tetap mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku.
b. Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY), penatausahaan persediaan dilakukan dengan menggunakan dua sistem informasi yang berbeda, yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk sistem informasi akuntansi dan SIM Persediaan untuk sistem informasi pengelolaan barang persediaan. Kedua sistem ini dijalankan oleh dua personil yang berbeda, yaitu petugas akuntansi dan pengurus barang persediaan. Masing-masing sistem mendukung pelaksanaan penatausahaan mulai dari pengadaan hingga pelaporan persediaan. Kedua sistem ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait akuntansi pemerintah dan pengelolaan barang milik daerah berupa persediaan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.
c. SIPD menerapkan kaidah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Pergub DIY Nomor 104 Tahun 2021 dan aturan turunannya. Sementara itu, SIM Persediaan mengikuti kaidah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri Nomor 19

Tahun 2016, Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, Pergub DIY Nomor 98 Tahun 2016, Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2020, dan aturan turunannya. Meskipun kedua sistem ini memiliki dasar peraturan yang berbeda, alur data penatausahaan persediaan, baik dari segi akuntansi maupun manajemen persediaan, tetap sinkron. Hal ini menghasilkan nilai persediaan yang konsisten antara laporan keuangan dan laporan saldo persediaan, dengan total nilai persediaan yang tercatat sebesar Rp2.679.033.658,57.

d. Meskipun penatausahaan persediaan di BPKA DIY telah dilakukan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Meskipun kendala tersebut dapat diselesaikan, penting untuk menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut, guna memastikan sistem pengelolaan barang persediaan berjalan lebih efisien dan efektif di masa mendatang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang telah dipaparkan, penelitian ini memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi persediaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY diharapkan untuk terus memperbarui dan mengoptimalkan sistem informasi akuntansi persediaan yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai persediaan dan beban persediaan tercatat dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pembaruan sistem ini sangat penting guna menjaga konsistensi dan akurasi laporan keuangan.
b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY perlu memberikan pelatihan rutin secara berkala kepada sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan persediaan dan laporan keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan sistem informasi akuntansi yang ada, serta prosedur yang benar dalam mencatat transaksi persediaan. Pemahaman yang baik mengenai sistem dan prosedur akan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan data persediaan.
c. Untuk mendukung pengelolaan persediaan dan laporan keuangan yang lebih efisien, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY disarankan untuk merutinkan kegiatan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Bidang Akuntansi dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan data persediaan yang berpotensi mempengaruhi keakuratan laporan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan.

Dengan mengikuti saran-saran di atas, diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dapat terus meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi persediaan dan pengelolaan barang milik daerah, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY atas izin dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengurus barang persediaan, petugas akuntansi, serta sekretaris BPKA DIY yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan wawancara sebagai bagian dari penelitian ini.

Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem informasi akuntansi persediaan di BPKA DIY serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Produk Hukum:

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Rebulik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Persediaan

Republik Indonesia. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah

Referensi Cetak:

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). UII Press Yogyakarta.

Mulyadi. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Salemba.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Accounting Information Systems* (14E ed.). Pearson.

Penelitian Sebelumnya :

Agustiningsih, E., Juliana Eka Putri, R., Hernawati Komputerisasi Akuntansi, E., Ekonomi, F., & Piksi Ganesha Jalan Gatot Subroto, P. (2021). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai di Dinas Pendidikan Kota Bandung*.

Alakel, W., Ahmad, I., & Budi Santoso, E. (2019). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN OBAT METODE FIRST IN FIRST OUT (STUDI KASUS: RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG). In *Jurnal TEKNOKOMPAK* (Vol. 13, Issue 1).

Irfansyah, A. (2022). ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN (ASAP) TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN PERSEDIAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR)*, *5*, 112–131.

Suhimarita, J., & Susianto, D. (2019). AMIK Dian Cipta Cendikia APLIKASI AKUTANSI PERSEDIAAN OBAT PADA KLINIK KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN LAMPUNG. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JUSINTA) JUSINTA |*, *2*(1).

Umboh, A., Tinangon, J., Deborah Umboh, A., Tinangon, J. J., & Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, F. (2021). *KESEHATAN KOTA MANADO ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF INVENTORIES OF PSAP NO. 5 IN DINAS KESEHATAN KOTA MANADO Oleh*. *9*(2), 967–974.